



SCAN ME

VERIFIKASI FAKTUAL DEWAN PERS
803/DP-Verifikasi/K/X/2021

KPK NONGOL SAAT ANIES-IMIN MESRA

KASUS DUGAAN KORUPSI YANG PERNAH MENYERET NAMA CAK IMIN

Dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kemnaker

- Peristiwa korupsi itu terjadi di tahun 2012, kala itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014.
- Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker I Nyoman Darmanta, Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia, dan Reyna Usman.
- Dalam kasus ini KPK sudah mengeledah Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, pada Jumat 18 Agustus 2023. Selain gedung Kemnaker, tim penyidik juga mengeledah sebuah rumah di Bekasi, Jawa Barat.

Data Selengkapnya di hal 11...

Government (Hal.2)
Pemerintah Terbitkan
Golden Visa
izinkan Investor Tinggal
di RI Satu Dekade

Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar resmi deklarasi sebagai Capres-Cawapres 2024 di Hotel Majapahit yang dulu bernama Yamato Hoteru Soerabaja, Sabtu (2/9/2023). Bak kode berpisah dengan Partai Demokrat, diketahui hotel tersebut merupakan tempat bersejarah saat dirobeknya warna biru milik bendera penjajah Belanda oleh arek Suroboyo. Namun tampaknya, kemesraan pasangan baru tersebut mulai diwarnai kegaduhan. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ternyata sedang mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan sistem proteksi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Lingkungan Kemenaker pada tahun 2012. Pada tahun tersebut, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Indonesia. Komisi anti-rasuah memastikan pengusutan kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan pencalonan Cak Imin dalam kontestasi Pemilu 2024. Lembaga yang diketuai Firlu ini menegaskan alat bukti telah terkumpul sejak Juli 2023. Melalui mekanisme gelar perkara kasus itu lalu dinaikan ke tingkat penyidikan. Surat perintah penyidikan (sprindik) lalu keluar di Agustus 2023.

(Baca Hal 11)

Pemerintah Terbitkan Golden Visa Izinkan Investor Tinggal di RI Satu Dekade

JAKARTA - Pemerintah mengesahkan aturan golden visa sebagai salah satu magnet bagi investor asing untuk menanamkan modal mereka, baik secara korporasi maupun individual. Dalam aturan tersebut, pemodal diberikan izin tinggal hingga maksimal satu dekade atau 10 tahun.

"Golden visa adalah visa yang diberikan sebagai dasar pemberian izin tinggal dalam jangka waktu lima sampai sepuluh tahun dalam rangka mendukung perekonomian," kata Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, sebagaimana dikutip dari situs web Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Minggu (3/9/2023).

Syarat yang harus dipenuhi investor asing untuk mengamankan visa tersebut, menurut Silmy, adalah komitmen investasi mereka di Indonesia. Untuk dapat tinggal di Indonesia selama lima tahun, investor asing perorangan yang akan mendirikan perusahaan domestik diharuskan menginjeksikan modal sebesar \$2,5 juta atau sekitar Rp38 miliar. Sedangkan untuk masa tinggal 10 tahun, nilai investasi yang disyaratkan pemerintah mencapai dua kali lipat besarnya, yaitu \$5 juta atau Rp76 miliar.

Sementara itu bagi investor korporasi yang mendirikan perusahaan di Indonesia dan menanamkan investasi sebesar \$25 juta atau sekitar Rp380 miliar, akan memperoleh golden visa dengan masa tinggal lima tahun bagi direksi dan komisarisnya. Pemerintah akan memberikan izin tinggal hingga sepuluh tahun jika nilai investasi yang ditanamkan investor mencapai \$50 juta atau Rp760 miliar.

"Karena kita sasar pelintas yang berkualitas, maka syaratnya lebih berbobot. Semakin lama tinggal di Indonesia, semakin tinggi nilai



(Ilustrasi) IKN Nusantara menjadi salah satu lokasi yang saat ini gencar ditawarkan pemerintah kepada para investor. (dok.ist)

jaminannya, terutama untuk kegiatan penanaman modal yang bisa sampai sekitar Rp760 miliar," tegas Silmy.

Meski demikian, ketentuan berbeda diberlakukan untuk investor asing perorangan yang tidak bermaksud mendirikan perusahaan di Indonesia. Untuk mengamankan golden visa selama lima tahun, pemohon diwajibkan menempatkan dana senilai \$350 ribu atau sekitar Rp5,3 miliar yang dapat digunakan untuk membeli obligasi pemerintah, saham perusahaan publik atau penempatan tabungan atau deposito. Sedangkan untuk golden visa 10 tahun, dana yang harus ditempatkan adalah sejumlah \$700 ribu atau sekitar Rp10,6 miliar.

Pemerintah menerbitkan kebijakan golden visa tersebut menyusul dikeluarkannya Peraturan Menteri Hukum dan HAM (Permenkumham) Nomor 22 Tahun 2023 mengenai Visa dan Izin Tinggal serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82 Tahun 2023 yang diundangkan pada 30 Agustus 2023.

Sebelum Indonesia, terdapat sejumlah negara yang telah terlebih dahulu menerapkan kebijakan golden visa tersebut, di antaranya Amerika Serikat (AS), Kanada, Uni Emirat Arab, Irlandia, Jerman, Selandia Baru, Italia dan Spanyol.

Silmy mengklaim negara-negara yang telah menerapkan kebijakan golden visa merasakan dampak positifnya. Denmark misalnya, berhasil menjadi salah satu negara yang terdepan dalam inovasi. Kemudian Uni Emirat Arab menjadi negara tujuan favorit investor mancanegara. "Harapannya, dengan kebijakan ini ke depannya Indonesia juga akan menerima dampak serupa. Apalagi negara kita punya segudang potensi untuk dikelola dan dikembangkan," tandas Silmy.

Kadin soal Target Rp 1.400 T

Terpisah, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menilai, pemerintah dapat mencapai target investasi sebesar Rp 1.400 triliun. Namun, hal tersebut harus dibarengi

dengan upaya pemerintah menjaga stabilitas baik dari sisi politik, perpajakan, hingga pertumbuhan ekonomi.

Wakil Ketua Umum Bidang Investasi Kadin Indonesia Tony Wenas mengatakan, beberapa hal yang menarik minat investor untuk investasi di Indonesia, yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi berada dalam kinerja baik. Selain itu, kebijakan hilirisasi diyakini akan mendorong realisasi investasi.

"Kalau dari kami di Kadin yakin target investasi tahun ini bisa tercapai sebesar Rp 1.400 triliun. Salah satu yang dominan adalah hilirisasi dari pertambangan itu sendiri. Secara umum, investasi sedang menarik. Mudah-mudahan seterusnya seperti itu," kata Tony Wenas di sela acara ASEAN Business and Investment Summit 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Minggu (3/9/2023).

Berdasarkan data Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), secara kumulatif data realisasi investasi sepanjang periode Januari-Juni (semester I) tahun 2023 mencapai Rp 678,7 triliun atau meningkat sebesar 16,1% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2022 dan berhasil menyerap 849.181 orang TKI. Capaian tersebut telah memenuhi 48,5% dari target realisasi investasi tahun 2023 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo sebesar Rp 1.400 triliun.

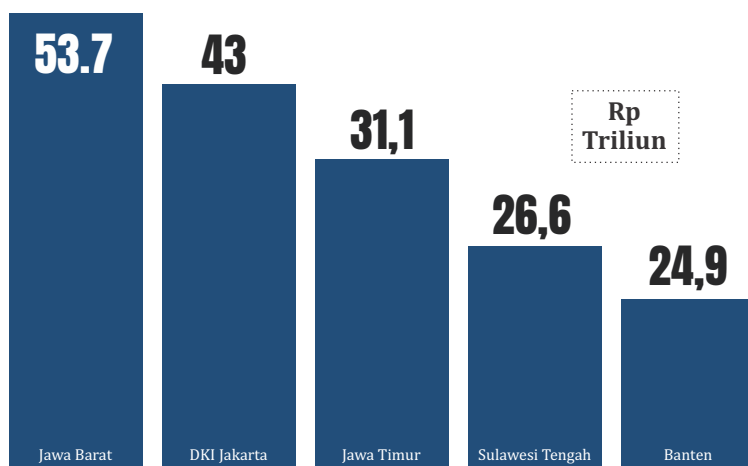
Tony menegaskan, kinerja investasi akan berjalan beriringan dengan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu pemerintah harus mengakomodasi kepentingan pengusaha baik dari sisi perizinan hingga kebijakan fiskal. Dalam hal ini, pemerintah bisa memberikan insentif fiskal kepada sektor-sektor yang dinilai memiliki efek pengganda.

"Kemudian kalau dikatakan ini mau dipajakin di depan yang lebih penting bukan pajaknya, tetapi yang lebih penting efek penggandanya. Kalau soal dipajaki, begitu dia untung dia akan bayar pajak. Jangan dipajakin ibaratnya sudah ditakut-takutin dengan pajak yang harus dibayar tetapi diberikan insentif," tutur Tony.

Upaya menumbuhkan kinerja investasi juga harus dibarengi dengan melibatkan pelaku UMKM lokal. Langkah tersebut dilakukan dengan melibatkan UMKM di dalam rantai pasok industri. Sehingga pertumbuhan realisasi investasi berjalan inklusif dan memberikan efek pengganda ke perekonomian.

"Jadi UMKM dan pengusaha lokal dilibatkan, pasti pergerakan ekonominya akan lebih cepat. Jadi bukan banyak portofolio investasi, yang diharapkan adalah investasi riil. Lapangan yang begitu ditaruh duit membangun sesuatu," ujar Tony. (wid,rls,ist,ant/dya)

5 PROVINSI DENGAN REALISASI INVESTASI PMDN DAN PMA TERBESAR (KUARTAL II-2023)



REALISASI INVESTASI INDUSTRI DAN TOTAL/NASIONAL (2017-2023)

| TAHUN | NASIONAL | INDUSTRI |
|-------|----------|----------|
| 2017 | 692,8 | 274,8 |
| 2018 | 721,3 | 222,3 |
| 2019 | 809,6 | 215,9 |
| 2020 | 826,3 | 272,9 |
| 2021 | 901,0 | 325,4 |
| 2022 | 1.207,2 | 497,7 |
| 2023* | 678,7 | 270,3 |

Triliun Rupiah

Dilaporkan Bawaslu soal Pelanggaran Kode Etik, DKPP Periksa Ketua dan Anggota KPU

JAKARTA -- Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akan menggelar sidang pemeriksaan terhadap ketua dan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Senin (4/9/2023) pukul 09/00 WIB terkait dengan dugaan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu (KEPP).

Sekretaris DKPP David Yama mengatakan, agenda sidang tersebut adalah mendengarkan keterangan pengadu dan teradu serta saksi-saksi atau pihak terkait yang dihadirkan. "DKPP telah memanggil semua pihak secara patut, yakni 5 hari sebelum sidang pemeriksaan digelar," kata David, Minggu (3/9/2023).

Perkara tersebut diadukan oleh Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Rahmat Bagja beserta anggota Bawaslu lainnya, yakni Totok Hariyono, Herywn J.M. Malonda, Puadi, dan Lolly Suhenty.

Para pengadu mengadukan Ketua KPU Hasyim Asy'ari beserta anggota KPU lainnya, yakni Mochammad Afifuddin, Betty Epsilon Idroos, Parsadaan Harahap, Yulianto Sudrajat, Idham Holik, dan August Mellaz.

Para teradu, dalam hal ini ketua dan anggota KPU, didalilkan membatasi tugas pengawasan para pengadu berkaitan dengan pembatasan akses data dan dokumen pada Sistem Informasi Pencilonan (Silon), serta pengawasan melekat pada Bawaslu berkaitan dengan jumlah personel dan durasi pengawasan.

Selain itu, para teradu juga didalilkan telah melaksanakan tahapan di luar program dan jadwal tahapan pemilu yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu, PKPU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu, serta PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencilonan Anggota DPR, DPR Provinsi, dan DPR Kabupaten/Kota.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara KEPP sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DKPP Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan DKPP Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara KEPP, sidang akan dipimpin oleh ketua dan anggota DKPP.

Di samping itu, Sekretaris DKPP mengatakan bahwa sidang kode etik ini bersifat terbuka untuk umum. DKPP akan menyiarkan sidang melalui akun Facebook dan YouTube DKPP. "Dengan demikian, masyarakat dan media massa dapat menyaksikan langsung jalannya sidang pemeriksaan ini," imbuh David.

Puncak Hoaks Diprediksi Februari

Di sisi lain, Anggota Bawaslu Herwyn JH Malonda memprediksikan puncak penyebaran hoaks di media sosial akan terjadi di bulan Februari



(Ilustrasi) Bawaslu memprediksikan puncak penyebaran hoaks di media sosial akan terjadi di bulan Februari 2024. (dok)

2024. Hal ini becemin pada fenomena yang terjadi di 2019 yang mana puncak hoaks terjadi di bulan April menjelang tahapan Pemungutan Suara

"Ini yang memang kita perlu perhatikan bersama, karena terkait isu informasi negatif maka tren hoaks dan berita tidak benar ini bisa meningkat. Kalau berkaca 2019, memuncak di April 2019 ketika berakhirnya tahapan kampanye sampai menjelang pemungutan suara. Nah kalau saat ini, bukan tidak mungkin, hoaks itu akan meningkat dan memuncak di akhir November 2023, pada tahapan kampanye sampai pada awal Februari 2024, menjelang tahapan pemungutan suara," ujarnya saat menjadi pengajar di kegiatan Mata Kuliah Kecerdasan Digital Lanjutan: Pemilu dan Transformasi Digital 2023 yang

digelar Universitas Gaja Mada (UGM), Sabtu (2/9/2023) secara daring.

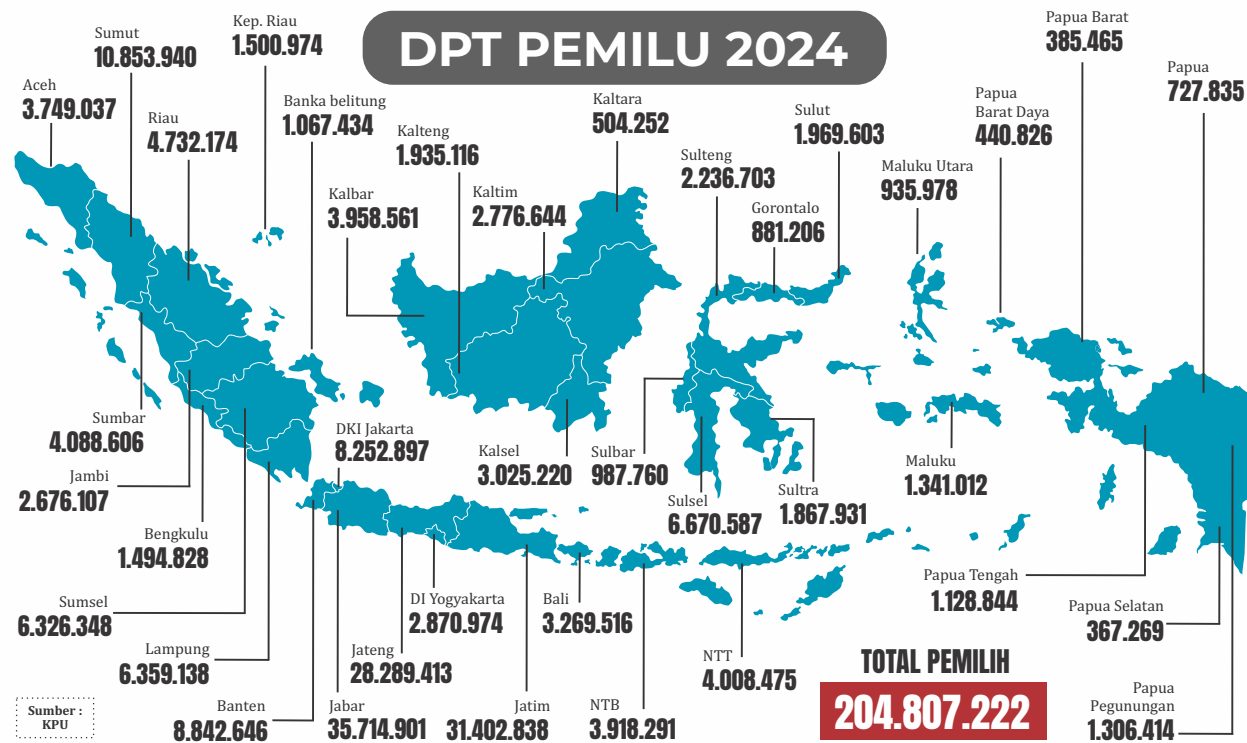
Herwyn menyampaikan, berdasarkan data yang ada pada 2019 silam, sebanyak 501 isu hoaks menyebar pada saat tersebut dan itu merupakan puncak dari penyebaran hoaks pada gelaran Pemilu 2019. Lebih lanjut, hal ini perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada Pemilu yang meliputi muncul dan menguatnya polarisasi di tengah masyarakat; kemulunya ketidakpercayaan pada penyelenggara Pemilu; kemudian masyarakat menjadi tidak percaya pada hasil Pemilu yang berakhir pada kekerasan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut Herwyn menjelaskan bahwa Bawaslu telah melakukan pencegahan dengan melakukan media monitoring

sekaligus mempublikasikan informasi dan edukasi ke pemilu secara massif agar maraknya informasi hoaks dapat diredam dengan berita kebenaran. "Kami juga melakukan kolaborasi kepada stakeholder terkait seperti Kemenkominfo, platform media sosial, media, dan konten kreator, dan juga membentuk gugus tugas pengawasan kampanye bersama KPI, KPU, dan Dewan Pers," cetusnya.

Dari sisi pengawasan, tentu Herwyn berharap ada peran aktif juga dari masyarakat untuk melaporkan jika ada terjadi penyebaran berita hoaks, ujaran SARA, dan ujaran kebencian melalui aplikasi Sigap Lapor. Melalui perspektif kelembagaan, Herwyn mengatakan Bawaslu juga akan melakukan pengawasan dan mencermati konten internet dari akun resmi media sosial partai politik atau gabungan partai politik, pasangan calon dan tim kampanye yang terdaftar di KPU dan mencatat hasil pengawasan konten internet yang diduga mengandung pelanggaran administrasi dan/ atau pidana ke form Laporan Hasil Pengawasan.

"Paling penting adalah dalam konteks kita dalam terjadi pergeseran kontestasi pemilu, pasti akan ada gesekan. Yang sebelumnya secara luring, sekarang menjadi daring. Tugas utama kita adalah, mari kita lakukan terlebih dahulu menyaring informasi untuk cek fakta, sebelum kita bagikan ke pihak lain. Dengan itu kita sudah membantu masyarakat supaya kita juga bisa mengangkat perintah undang-undang dasar yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa," tuntas Herwyn.(wid,rls,ist/dya)



Uji Emisi Kendaraan Diterapkan di Jakarta, Banyak Kendaraan Kena Tilang



Polisi menghentikan kendaraan untuk melakukan uji emisi di kawasan Terminal Blok M, Jakarta, Jumat 25 Agustus 2023. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mulai melakukan uji coba tilang uji emisi bermotor pada Jumat 25 Agustus di lima titik yang tersebar di lima wilayah kotamadya sebagai upaya pengendalian pencemaran udara di Jakarta. ANTARA FOTO/Reno Esnir

JAKARTA – Pemerintah melakukan pengetatan uji emisi kendaraan bermotor lewat pemberlakuan sanksi secara maksimal. Akibatnya, banyak yang terjaring dalam razia uji emisi dan mendapatkan saksu. Pengendara motor yang kendaraannya terjaring tak memenuhi standar emisi menurut alat ukur milik Dinas dan Kementerian Lingkungan hidup didenda Rp 250 ribu. Pengendara mobil Rp 500 ribu.

Data dari Polda Metro Jaya menyebut ada sebanyak 66 dari 471 pengendara yang diberikan bukti pelanggaran atau tilang emisi sepanjang hari pertama, Jumat (1/9/2023). Mereka berasal dari 471 kendaraan yang telah diuji emisinya serentak di Jakarta Pusat, Utara, Timur, Barat, dan Selatan.

Sebanyak 15 persen yang tidak lulus uji emisi itu terdiri dari 33 kendaraan roda dua dan 33 roda empat. Di antara mereka adalah Andi, seorang pengendara motor yang mengikuti uji emisi di di halaman belakang Gedung Subdirektorat Penegakkan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, Jalan M. T. Haryono, Jakarta Selatan. Di lokasi ini, Andi dan lainnya sukarela meninggalkan kendaraan mereka untuk uji emisi yang tertera gratis.

Khusus Andi, dia membawa keyakinan tinggi karena sehari sebelumnya memenuhi imbauan untuk melakukan pemeliharaan untuk sepeda motornya di bengkel. Tapi, ternyata, alat uji Automotive Gas Analyzer milik kementerian bicara lain. Emisi dari sepeda motornya dinilai tidak memenuhi standar.

Andi akhirnya meninggalkan lokasi tanpa STNK sepeda motornya, digantikan dengan tilang berdenda Rp 250 ribu. "Katanya, setting-annya nggak bagus. Campuran bensinnya besar jadi karbonnya yang ke luar

banyak, di luar ambang batas," ujarnya ambyar, dikutip dari tempo.co, Minggu (3/9/2023).

Suwarna sama dengan Andi, berinisiatif ikut uji emisi karena peduli dengan kualitas udara Jakarta. Pengendara ojek online (ojol) ini juga malah diberi 'surat cinta' oleh polisi dan STNK-nya disita jadi barang bukti. Apalagi dia harus membayar denda maksimal Rp 250 ribu yang dirasa memberatkan. "Sekarang mencari (orderan) sudah enggak seperti dulu. Gojek sepi, penghasilannya kurang," katanya.

Sementara itu, salah seorang pengemudi Toyota Inova keluaran 2019, Feri (45), sempat mengaku heran saat ditilang karena mobilnya bukanlah kendaraan tua. Feri juga mengaku rutin melakukan servis dan mengganti oli kendaraan setiap 10.000 kilometer.

"Saya pikir kan razia biasa aja karena kan bukan mobil tua ya, makanya enggak tahu juga ya padahal kan mobilnya masih muda, belum lima tahun," ucap dia di lokasi uji emisi, Jalan Industri Raya, Jakarta Pusat.

Oksan adalah contoh berbeda dari Andi dan Suwarna. Oksan berada dalam kelompok 85 persen pengendara yang lolos uji emisi hari pertama. Menurutnya, uji emisi di bengkel resmi sudah dijalani pada 2022 lalu. "Untuk rekan-rekan yang belum, sebaiknya melakukan uji emisi. Supaya tidak mencemari lingkungan di ibu kota ini," ujarnya.

Polisi memperingatkan agar pengendara jangan sampai terjaring tilang berlapis dalam razia emisi yang telah diberlakukan di Jakarta per Jumat 1 September 2023. Pasalnya, razia emisi telah disertai denda maksimal Rp 250 ribu untuk sepeda motor dan Rp 500 ribu untuk mobil.

Denda juga akan diterapkan jika pengendara melakukan pelanggaran lalu lintas lainnya. Misalnya, tidak mengenakan helm untuk pengendara motor. "Saat diperiksa mungkin saja tidak layak jalan atau kelengkapan yang lain tidak memenuhi," ujar Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Ajun Komisararis Besar Doni Hermawan.

Doni menuturkan bahwa kelengkapan berkendara juga akan diperiksa dalam razia emisi, seperti STNK untuk bukti kepemilikan kendaraan. "Sebelum diuji, pengendara mesti menunjukkan STNK untuk pencatatan data oleh petugas," katanya menambahkan.

Doni Hermawan berdalih tilang emisi untuk ikut membantu melaksanakan kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Polda Metro Jaya, kata dia, melaksanakan penegakan hukum tilang emisi itu dengan Pasal 285 ayat (1) dan Pasal 286 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Polisi akan menilang maksimal dengan denda Rp 250 ribu untuk sepeda motor dan Rp 500 ribu untuk mobil. Lalu pengendara akan diberikan surat tilang biasa dengan penyitaan SIM (Surat Izin Mengemudi) atau STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan pengetatan uji emisi sebagai salah satu kebijakan jangka pendek yang efektif untuk mengurangi polusi udara di Jakarta. Dia merujuk kepada emisi polusi dari sumber bergerak yakni transportasi. Asep hanya mengatakan semua pemilik kendaraan bermotor harus memperhatikan kondisi kendaraannya. "Karena keadaan mesin akan mempengaruhi hasil uji emisi," kata dia.

Selain itu, Asep juga menyarankan kepada setiap bengkel kendaraan agar menyediakan uji emisi dalam paket layanan servis. Bukti hasil uji emisi dari bengkel yang terafiliasi resmi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta maupun Kementerian LHK disebutnya akan membuktikan kelayakan kendaraan, dan yang terpenting terhindar dari razia emisi oleh polisi.

"Semua data hasil uji emisi dari bengkel harus terdata di kami, karena itu akan menjadi dasar bagi pengenaan tilang ke depannya," tutur Asep sambil menambahkan, "Jika hasil uji emisi tidak terdaftar di Dinas Lingkungan Hidup, maka polisi berhak menilang kendaraan."

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Asep Kuswanto menegaskan pengetatan uji emisi sebagai salah satu kebijakan jangka pendek yang efektif untuk mengurangi

polusi udara di Jakarta. Dia merujuk kepada emisi polusi dari sumber bergerak yakni transportasi.

Adapun Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisararis Besar Latif Usman mengatakan, pelaksanaan razia dan tilang emisi akan berpindah-pindah lokasi. Polisi menasar lokasi yang ramai dan memungkinkan untuk menampung antrean kendaraan. Apakah itu di pusat Jakarta maupun wilayah penyangga. "Jadi daripada terkena tilang, masyarakat diimbau segera menguji emisi ke bengkel resmi terdekat," kata Latif.

Tarif uji emisi di bengkel Rp 50 ribu untuk sepeda motor dan Rp 100 ribu untuk mobil. Nantinya petugas bengkel memberikan bukti hasil uji, lalu pengendara bisa menunjukkan ke polisi jika ada razia uji emisi.

Lantas, apa kriteria kendaraan yang tak lulus uji emisi di Jakarta? uji emisi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kendaraan yang tak lulus uji emisi sendiri adalah kendaraan bermotor dengan hasil pengujian di atas ambang batas emisi gas buang kendaraan.

Parameter atau syarat ambang batas tersebut mengacu pada Peraturan Gubernur DKI Jakarta Nomor 31 Tahun 2008 tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan bermotor. Merujuk Peraturan Gubernur tersebut, berikut rincian ambang batas emisi gas buang kendaraan: Mobil bensin tahun produksi di bawah 2007, wajib memiliki kadar karbon monoksida (CO) di bawah 3,0 persen dengan hidrokarbon (HC) di bawah 700 part per million (ppm).

Mobil bensin tahun produksi di atas 2007, wajib kadar CO di bawah 1,5 persen dengan HC di bawah 200 ppm. Mobil diesel tahun produksi di bawah 2010 dan bobot kendaraan di bawah 3,5 ton, wajib memiliki kadar opasitas (timbangan) maksimal 50 persen. Mobil diesel tahun produksi di atas 2010 dan bobot kendaraan di bawah 3,5 ton, wajib memiliki kadar opasitas maksimal 40 persen.

Mobil diesel tahun produksi di bawah 2010 dan bobot kendaraan di atas 3,5 ton, wajib memiliki kadar opasitas maksimal 60 persen. Mobil diesel tahun produksi di atas 2010 dan bobot kendaraan di atas 3,5 ton, wajib memiliki kadar opasitas maksimal 50 persen.

Motor 2 tak (motor bakar dua langkah) produksi di bawah tahun 2010, CO di bawah 4,5 persen dan HC 12.000 ppm. Motor 4 tak (motor bakar empat langkah) produksi di bawah tahun 2020, CO maksimal 5,5 persen dan HC 2.400 ppm. Motor di atas 2010, 2 tak maupun 4 tak, CO wajib maksimal 4,5 persen dan HC 2.000 ppm. (lut/dua)

Unesa, UGM, dan Politeknik Negeri Madiun Kembangkan Edu Wisata di Sidomukti Magetan

SURABAYA – Batik merupakan salah satu bahan tekstil yang menjadi identitas budaya bangsa. Hampir setiap wilayah di Indonesia memiliki motif batik. Kabupaten Magetan merupakan wilayah di Provinsi Jawa Timur yang juga memiliki industri batik yang tepatnya berada di Desa Sidomukti. Motif batik yang menjadi ciri khasnya adalah motif pring.

Selain batik, Desa Sidomukti juga memiliki pemandangan yang indah serta kebun sayur yang sangat luas. Situasi ini yang kemudian mendorong Universitas Negeri Surabaya (Unesa), Universitas Gadjah Mada (UGM), dan Politeknik Negeri Madiun (PNM) berkolaborasi menggagas wisata konsep baru yang diberi nama “edu-ekowisata” di Desa Sidomukti melalui program Matching Fund Kedaireka.

“Tujuan program ini adalah mengembangkan edu-ekowisata batik di Desa Sidomukti, dimana masyarakat tidak hanya disuguhkan berbagai produk batik (kain, tas, kaos) namun juga dapat belajar membatik, mengenalkan motif batik Magetan sejak dini melalui buku mewarnai batik, menikmati pemandangan dengan berbagai alat transportasi tradisional yang tersedia,” kata Prof. Dr. Ir. Erina Rahmadyanti, S.T., M.T., IPM dari Unesa.

Selain itu, kolaborasi perguruan



tinggi ini juga melakukan rancang bangun instalasi pengolahan air limbah (IPAL) bagi Mukti Rahayu. Hal ini dimaksudkan agar limbah cair yang dihasilkan dapat dikelola dengan baik serta tidak mencemari lingkungan apalagi wilayah ini juga memiliki produktivitas tinggi terhadap hasil pertanian.

Daerah ini juga akan didukung

berbagai sarana prasarana humanistik wisata seperti gazebo, tempat sampah, bollard, termasuk rambu lalu lintas. Metode yang diimplementasikan pada kegiatan ini meliputi edukasi, pelatihan, dan pendampingan. Batik Magetan warna alam juga akan dikembangkan sebagai alternatif pilihan bagi konsumen khususnya luar negeri mengingat batik juga

merupakan ujung tombak ekspor tekstil nasional.

Tim pelaksana merupakan kolaborasi antar perguruan tinggi yang terdiri dari Prof. Dr. Ir. Erina Rahmadyanti, S.T., M.T., IPM (Unesa); Prof. Dr. Sarmini, M.Hum (Unesa); Prof. Dr. Ir. Agus Taufik Mulyono, S.T., M.T., IPU., ASEAN.Eng (UGM); Martini D.E. Susanti, S.Kom., M.Kom (Unesa); Muhammad Supriyanto, S.E., M.M (PNM). “Kegiatan ini melibatkan mahasiswa melalui kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai wujud optimalisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM),” kata Prof Erina, Sabtu (2/9/2023)

Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan khususnya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Magetan memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini dengan memberikan pendampingan melalui penyuluh lapangan.

Edu-ekowisata batik yang dikembangkan ini diharapkan menjadi alternatif destinasi wisata bagi keluarga sekaligus untuk mendukung Kabupaten Magetan sebagai Kota Pariwisata. Pasca kegiatan Matching Fund Kedaireka pengelolaan akan diserahkan pada Bumdes dan Pokdarwis yang diharapkan dapat berjalan berkelanjutan. (lut/dya)

Untag Surabaya Siapkan Lulusan Update Perkembangan Zaman

SURABAYA – Dalam mengukuhkan 1.876 wisudawan pada wisuda ke-127, Minggu (3/9/2023), Untag Surabaya berhadapan para lulusan diharapkan hidup dengan konsep berkelanjutan. Harapan itu sejalan dengan tema yang diusung dalam Wisuda Periode II Semester Genap Tahun Ajaran 2023/2024 ini, yaitu ‘Bersiap untuk Keberlanjutan’. Itu untuk menyambut Indonesia Emas 2045 mendatang.

“Harapan kita tentunya wisudawan ini sesuai dengan temanya yakni sustainability. Artinya, generasi emas pada tahun 2045 ini, harus sustain,” ujar Rektor Untag Surabaya Prof Mulyanto Nugroho.

Berbahaya jika para lulusan ini tidak bisa sustain. Kata Prof Nugroho, mereka harus mengerti bagaimana berkelanjutan untuk lingkungan atau penghijauan, bahkan di dalam pekerjaan. “Kalau kita tidak berkelanjutan, baik itu tentang penghijauan, pekerjaan, itu bahaya untuk yang akan datang. Harapan kita patriot merah putih ini dia harus tau bagaimana sustain,” katanya.

Selain itu ia juga mengapresiasi

sinergi dan kerja keras seluruh Mahasiswa dan Civitas Akademika Untag Surabaya. Karena pada 18 Januari 2023, Untag Surabaya berhasil mendapatkan “Akreditasi Unggul”. Ia mengakui bahwa Akreditasi tersebut tak gampang diraih, karena dari sekitar 4.400 PTN dan PTS, hanya 65 yang berhasil meraihnya, salah satunya adalah Untag Surabaya.

“Teruslah memegang teguh nilai Untag Surabaya sebagai kampus merah putih yang nasionalis. Kami berharap para wisudawan wisudawati menjadi patriot merah putih yang terus menjunjung tinggi toleransi dan menjaga persatuan untuk bangsa kita tercinta,” lanjut Mulyanto.

Begitu pula dengan Ketua Pengurus Yayasan Untag Surabaya, J. Subekti, S.H., M.M. Ia berpesan kepada seluruh wisudawan, bahwa hari ini adalah awal untuk mendapatkan ujian-ujian di tengah masyarakat, bagi wisudawan S1. Ia juga menganggap wisuda ini adalah pecut untuk menunjukkan bagaimana integritas lulusan Untag Surabaya yang terkenal sebagai kampus nasionalis, bagi wisudawan Magister dan Doktor.

“Keberhasilan yang sudah dicapai oleh Untag Surabaya hendaknya kita ikutkan. Kita harus menyongsong tahun 2045 sebagai tahun di mana Indonesia merupakan negara yang maju,” tegasnya.

Di hari pertama wisuda ini, 938 Mahasiswa dari 10 Program Studi (Prodi) dinyatakan lulus, Yeng meliputi 197 dari Prodi Manajemen, 58 Akuntansi, 132 Ekonomi Pembangunan, 154 Administrasi Negara, 129 Administrasi Niaga, 200 Ilmu Komunikasi, 18 Magister Manajemen, 10 Magister Ilmu Administrasi Publik, 10 Doktor Ilmu Administrasi, dan 30 Doktor Ilmu Ekonomi.

Sedangkan Minggu (3/9/2023) dilaksanakan kembali wisuda bagi 938 mahasiswa dari 18 program studi, di antaranya Teknologi Manufaktur, Teknologi Listrik, Argoindustri, Sastra Inggris, Sastra Jepang, Psikologi, Ilmu



Foto bersama wisudawan terbaik pada Wisuda ke 127 UNTAG Surabaya, Sabtu (2/9/2023). (Jannatul Firdaus/Lenteratoday).

Hukum, Teknik Industri, Teknik Mesin, Teknik Sipil, Arsitektur, Teknik Elektro, Teknik Informatika, Magister Psikologi, Psikologi Profesi, Magister Ilmu Hukum, Magister Teknik Sipil, dan Doktor Ilmu Hukum. Wisuda periode ini dibagi dua tahap. Kemarin, ada 938 wisudawan yang dikukuhkan. Mereka adalah 870 wisudawan S1 dari 6 prodi, 28 wisudawan S2 dari 3 prodi, dan 40 wisudawan S3 dari 3 prodi. (jan/lut)

MENUNGGU FILM NOVEL 'HATI SUHITA' KARYA

KHILMA ANIS

Foto : FB @Khilma Anis

NOVEL best seller 'Hati Suhita' akan tayang di layar lebar. Kabar ini datang dari penulis novel Hati Suhita, Khilma Anis melalui akun Instagramnya @khilma_anis.

Sejatinya, film 'Hati Suhita' diadaptasi dari novel karya Khilma Anis dengan judul yang sama. Film drama roman religi ini disutradarai Archie Hakegery dan naskahnya ditulis melalui 'tangan dingin' Alim Sudio.

Film ini juga dibintangi deretan artis top seperti Nadya Arina, Omar Daniel, Anggika Bolsterli, Desy Ratnasari, Slamet Rahardjo, Wafda Saifan, Tanta Ginting, dan masih banyak lagi.

Ning Khilma, sapaan akrabnya, mengaku terharu dan bersyukur

karena film yang diproduksi oleh Starvision ini sesuai harapan.

"Saya bangga dan bahagia karena Starvision benar-benar memilhkan segala sesuatunya yang terbaik untuk film Suhita. Mulai pemilihan sutradara, penulis skenario, semua pemain, seluruh tim, soundtrack, semuanya andalan. Benar-benar istimewa," tulisnya.

Sutradara Archie Hakegery mengatakan bahwa, film ini memulai syuting pada 20 Agustus 2022 di sembilan kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

"Kami syuting ada di sembilan kota, itu di Bogor, Jakarta, Trenggalek, Kediri, Yogyakarta dan masih ada lagi," tambah Archie.

Sementara itu, Chand Parwez

selaku produser film Hati Suhita mengatakan, penggarapan film ini akan dibuat secara serius. Mengingat novelnya memiliki banyak penggemar serta jadi best seller.

Sayangnya, belum diketahui secara pasti kapan film karya sutradara Archie ini akan dirilis di bioskop.

Nama Khilma Anis kini semakin terkenal usai karyanya yang berjudul Hati Suhita sukses diproduksi menjadi Film. Simak profil dan biodatanya mulai dari umur, asal, pendidikan hingga perjalanan karirnya.

Film Hati Suhita diadopsi dari Novel karya Khilma Anis yang baru saja tayang serentak pada 25 Mei 2023.

Sebelumnya tak banyak yang tahu siapa sosok penulis novel ini. Beliau

merupakan Putri Kyai pemilik Ponpes An Nur di Desa Kesilir, Kecamatan Wuluhan, Kabupaten Jember, Jawa Timur.

Ning Khilma selain aktif sebagai penulis, beliau juga menjadi Pengurus Ponpes An Nur, selain itu Ia juga memiliki bisnis.

Kepiawaiannya dalam menulis telah dimilikinya sejak menjadi mahasiswa, pada saat itu Beliau mengikuti Organisasi Pers bernama ARENA di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Selama menjadi Mahasiswa Beliau juga aktif berorganisasi di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII).

Perempuan kelahiran Jember itu telah menghasilkan beberapa karya novelnya diantaranya berjudul Wigati, Jadilah Purnamaku Ning, dan Hati Suhita.

Ning Pengasuh Ponpes An Nur Jember itu diketahui telah menikah dengan Chazyal Mazda Choirozyad dan dikaruniai 2 anak.

Bisnis yang kini digelutinya bernama Omah Suhita dan produk yang dihasilkan berupa kain batik, sarung batik, tas dan jilbab. (berbagai sumber)





PERUBAHAN PERILAKU INDIKASI MENTAL PADA REMAJA

ADA banyak faktor yang membuat kesehatan mental di masa remaja menjadi sangat rentan terganggu, salah satunya adalah traumatis yang dialami hingga mereka dewasa.

Banyak dari mereka yang enggan untuk membuka diri mengenai masalah yang dihadapi, sehingga kondisi kesehatan mental yang kian hari kian menjadi serius dan berdampak buruk bagi kesehatan mental dan juga fisik.

Ketua Satgas Remaja Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) Dr. Rodman Tarigan SpA(K), M.Kes mengingatkan para orang tua untuk mewaspadai perubahan perilaku yang mengindikasikan tanda-tanda timbulnya masalah mental pada anak remaja mereka.

Dr. Rodman mengatakan apabila remaja tiba-tiba berubah dari seseorang yang ceria menjadi lebih tertutup, menarik diri dari kegiatan sekolah dan teman-teman, serta sering mengeluh sakit fisik tanpa sebab yang jelas, hal tersebut bisa dicurigai sebagai perubahan perilaku yang mengindikasikan masalah mental pada remaja.

"Jadi kalau ada satu saja yang kita temukan, kita sebagai orang tua perlu menyadari bahwa ada perubahan perilaku dari anak tersebut," ujar Dr. Rodman dalam seminar media "Mendidik Remaja yang Kuat Secara Mental dan Sosial" yang digelar daring.

Dr. Rodman mengatakan salah satu permasalahan pada anak usia sekolah

dan remaja adalah kesehatan mental dan emosional. Dalam data yang dipaparkannya, sebanyak 10 persen anak usia 15 hingga 24 tahun memiliki gangguan mental dan emosional.

Dia mengatakan orang tua dan lingkungan sekitar harus mampu merespons perubahan perilaku pada remaja. Anak dengan masalah mental umumnya mengalami stres, depresi, bahkan melakukan tindakan-tindakan negatif seperti tawuran, kekerasan hingga mencuri.

Menurutnya, jika ada setidaknya satu tanda perubahan perilaku yang mencolok, langkah pertama yang harus dilakukan adalah berkomunikasi dengan remaja tersebut.

Berikan kesempatan kepada anak untuk berbicara tentang perasaan dan pengalaman yang dialami.

Orang tua harus menjadi pen-

dengar yang baik dan memahami permasalahan yang dihadapi remaja tersebut.

Orang tua juga harus memberikan dukungan yang kuat dan memastikan bahwa sang anak tidak sendirian menghadapi masalahnya.

Selain itu, orang tua juga dapat mengenalkan anak pada aktivitas yang produktif dan positif.

Namun, Dr. Rodman tidak memungkirinya bahwa pada sejumlah kasus terdapat remaja yang enggan berbicara tentang permasalahan mereka kepada orang tuanya. Hal ini bisa dipicu oleh kurangnya kepercayaan atau faktor lain yang memengaruhi hubungan.

Jika hal tersebut terjadi, proses identifikasi akar permasalahan bisa menjadi lebih sulit dan membutuhkan kesabaran.

Apabila orang tua merasa bahwa mereka tidak mampu menangani permasalahan sang anak, mencari bantuan dari ahli bisa menjadi pilihan.

Dr. Rodman mengatakan bahwa layanan konseling bisa dimanfaatkan untuk menangani remaja dengan masalah mental.

Pemerintah telah menyediakan layanan konseling melalui program Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja (PKPR) di puskesmas, yang dirancang untuk memberikan dukungan psikologis kepada remaja.

"Itu sudah ada di semua puskesmas dan itu di-cover oleh BPJS. Apabila tidak bisa diatasi di puskesmas, itu akan dirujuk ke rumah sakit PPK (pemberi pelayanan kesehatan) 2, di situ ada dokter anak, mungkin juga layanan psikolog atau layanan dari psikiater," kata Dr. Rodman (Ant).



Itu sudah ada di semua puskesmas dan itu di-cover oleh BPJS. Apabila tidak bisa diatasi di puskesmas, itu akan dirujuk ke rumah sakit PPK (pemberi pelayanan kesehatan) 2, di situ ada dokter anak, mungkin juga layanan psikolog atau layanan dari psikiater

Dr. Rodman Tarigan SpA(K), M.Kes

Ketua Satgas Remaja Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI)

PEMERINTAH PERLUAS BANTUAN PEMBELIAN MOTOR LISTRIK

PEMERINTAH memperluas bantuan pembelian motor listrik melalui penerbitan Peraturan Menteri Perindustrian (Permenperin) Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Permenperin No. 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah untuk Pembelian Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) Roda Dua.

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan lewat permenperin ini, maka program bantuan diberikan untuk satu kali pembelian kendaraan bermotor listrik (KBL) Berbasis Baterai Roda Dua yang dilakukan oleh masyarakat dengan satu nomor induk kependudukan (NIK) yang sama.

Masyarakat yang ingin mendapatkan program bantuan pemerintah ini, syaratnya adalah WNI berusia paling rendah 17 tahun dan memiliki KTP elektronik. Satu NIK KTP bisa membeli satu unit motor listrik.

Menperin menjelaskan dasar utama perubahan kebijakan ini adalah untuk percepatan dalam membangun ekosistem kendaraan listrik di dalam negeri serta mewujudkan Indonesia yang lebih bersih.

Tujuan tersebut, tentu akan berdampak terhadap peningkatan investasi, memacu produktivitas dan daya saing industri, serta perluasan tenaga kerja.

Melalui program bantuan pemerintah ini, masyarakat akan mendapat potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian satu unit KBL Berbasis Baterai Roda Dua atau motor listrik.

Pemerintah akan membayar penggantian potongan harga atas pembelian motor listrik oleh masyarakat kepada perusahaan industri.

Permenperin 21/2023 juga

menegaskan, dalam melakukan proses pembelian KBL Berbasis Baterai Roda Dua, dealer perlu melakukan pemeriksaan kesesuaian data pembeli yang berbasis NIK yang terintegrasi dengan data Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dengan menggunakan sistem informasi yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian.

Data itu disebut Sistem Informasi Pemberian Bantuan Pembelian Kendaraan Listrik Roda Dua (SISAPIRA).

Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli) Budi Setyadi mengaku optimistis bahwa penjualan sepeda motor listrik dengan subsidi Rp7 juta dari pemerintah akan mencapai target 200.000 unit pada tahun 2023.

Hal ini seiring dengan dilakukannya perluasan terhadap penerima subsidi motor listrik untuk umum, yang akan mengerek jumlah peminat hingga mencapai target yang ditetapkan pemerintah.

"Dengan adanya skema yang baru pastinya itu akan mendorong kenaikan minat masyarakat. Sekarang pun sudah banyak industri yang tanya-tanya. Yang kita harapkan percepatan dari regulasi ini (perubahan skema), sehingga sampai Desember, kita optimis," ujar Budi.

Budi menilai optimisme itu, juga didorong oleh kesiapan para industri yang akan menyediakan sepeda motor listrik.

Bahkan, tak hanya untuk memenuhi permintaan dari



masyarakat, tetapi industri juga siap untuk memenuhi permintaan dari sejumlah instansi pemerintah yang sudah didorong menggunakan kendaraan listrik sebagai kendaraan operasional.

Selain itu, Aismoli mengatakan jumlah industri sepeda motor listrik yang ingin menjadi mitra pemerintah juga semakin banyak. Hal ini terlihat dari industri yang mulai menaikkan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) minimal 40 persen sebagaimana disyaratkan pemerintah.

Tercatat sudah ada 14 perusahaan dengan 30 model motor listrik yang sudah bermitra dengan pemerintah. Ke depan, pihaknya memastikan akan terus bertambah (Ant)



Dengan adanya skema yang baru pastinya itu akan mendorong kenaikan minat masyarakat. Sekarang pun sudah banyak industri yang tanya-tanya. Yang kita harapkan percepatan dari regulasi ini (perubahan skema), sehingga sampai Desember, kita optimis,"

BUDI SETYADI

Ketua Asosiasi Sepeda Motor Listrik Indonesia (Aismoli)

HARIAN
LENTERA
Inspirasi Perubahan **TODAY**

HARIAN "LENTERA TODAY"

PIMPINAN PERUSAHAAN TARMUJI TALMACSI

OMBUDSMAN SUKARJITO (ID Sertifikasi 14319)

PENANGGUNG JAWAB ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

PIMPINAN REDAKSI ARIFIN B.H (ID Sertifikasi 13043)

REDAKTUR PELAKSANA AGUSTINA WIDYAWATI (ID Sertifikasi 2567)

MEDIA TERVERIFIKASI



BIRO: SURABAYA: LUTFI YUHANDI | **MOJOKERTO:** RAHMAD SURYADI | **GRESIK-LAMONGAN:** ASEPTA YOGA P (ID SERTIFIKASI 3189) | **KEDIRI-JOMBANG-NGANJUK:** GATOT SUNARNO | **TAPAL KUDA (PASURUAN-PROBOLINGGO BONDOWOSO- SITUBONDO-LUMAJANG-JEMBER-BANYUWANGI):** IMAN SANTOSO, | **MADIUN:** IMAM GHOZALI (ID SERTIFIKASI 11563), | **BLITAR:** ARIEF SUKAPUTRA | **TRENGGALEK:** ANGGA PRAYOGA

PENASEHAT HUKUM DR. NURIYANTO A. DAIM, SH, MH | **MARKETING COMMUNICATION** JOKO PRASETYO | **SEKERTARIS** ISTIDHA NUR AMANAH,

DESAIN GRAFIS PAULUS IVAN | **ALAMAT REDAKSI** JL RUNGKUT ASRI UTARA VI/26 | **TELP** 03187854491 | **PENERBIT** PT MEDIA HEBAT INSPIRASI INDONESIA | **ALAMAT PERCETAKAN** SMILE GRAFIKA JL. RAYA KALIRUNGKUT 42 SURABAYA | **TELP IKLAN** 031-87854491 | **NIB** 91205006801134 | **HARGA IKLAN** RP 25.000 MM/KOLOM

Wartawan Lentera Today dalam setiap bertugas dilengkapi dengan tanda pengenal ke wartawan/kartu pers yang dikeluarkan perusahaan secara sah. Nama pemegang tanda pengenal ke wartawan/kartu pers Lentera Today tercantum di Box Redaksi. Siapa pun yang mengaku/mengatasnamakan Lentera Today, tanpa bisa menunjukkan surat/kartu tanda pengenal atau namanya tidak tercantum dalam Kotak Redaksi, agar ditolak/ dikonfirmasi/dilaporkan ke manajemen redaksi/perusahaan atau melalui nomor telepon yang tertera di Kotak Redaksi. Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, setiap wartawan Lentera Today dilarang menerima dan/atau meminta apa pun dengan alasan apa pun.

KEMENKES RILIS JENIS MASKER UNTUK KURANGI RISIKO POLUSI UDARA

POLUSI udara di beberapa kota di Indonesia rasanya semakin parah. Menurut AirVisual, situs penyedia peta polusi harian kota-kota besar di dunia, pada 30 September 2019, Jakarta menempati ranking ke-12. Boleh dibilang kondisi ini “membaik” dibandingkan pada 6 September 2019. Kala itu Jakarta sebagai kota besar dengan polusi udara terburuk kedua di dunia.

Selain Jakarta, ada pula kota-kota lainnya, khususnya di wilayah Sumatera yang tingkat polusi amat memprihatinkan. Alasannya jelas, kondisi itu dipicu oleh kebakaran hutan yang terjadi di beberapa titik.

Beberapa jenis masker standar dapat digunakan untuk mengurangi risiko polusi udara di DKI Jakarta.

Hal ini disampaikan Agus Dwi Susanto, Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara Kemenkes dalam konferensi pers di Gedung Kemenkes RI, Senin (28/8/2023).

“Pada prinsipnya, standar masker ini adalah yang mampu memfiltrasi polutan PM 2,5. Itu yang kita rekomendasikan,” katanya.

Berikut beberapa masker yang bisa digunakan untuk mengurangi dampak polusi udara:

1. Masker Respirator: Elastomeric, N95, KN95, KF94/95

Menurut Agus, terdapat empat jenis masker yang termasuk dalam kelompok ini, yaitu respirator elastomeric, respirator N95, KN 95, serta KF94/95.

“Hanya saja ini tidak nyaman, kan pengap,” katanya.

Dia lebih merekomendasikan penggunaan masker kelompok ini untuk pekerja di luar ruangan, seperti pekerja lapangan dengan waktu kerja sekitar 8 jam.

Adapun kelompok masker respirator ini mempunyai kemampuan filtrasi PM 2,5 yang tinggi. Filtrasi masker respirator elastomeric mencapai lebih dari 95 persen, sementara jenis lainnya bervariasi antara 80-97 persen.

2. Face Mask dengan Filtrasi PM 2,5

Agus kemudian merekomendasikan masker yang lebih “ringan” bagi masyarakat yang beraktivitas kurang dari 8 jam di luar ruangan, yakni face mask yang dilengkapi filtrasi PM 2,5.

“Masker ini mirip masker biasa, tapi ia mampu memfiltrasi hingga 95 persen lebih. Banyak produk masker tersebut dari Jepang,” katanya.

Pihaknya melalui Dirjen Ke-

farmasian dan Alat Kesehatan (Farmalkes) memfasilitasi masyarakat yang hendak memastikan keberadaan masker ini.

3. Masker Kain + Filter PM 2,5 Disposable

Masyarakat dapat pula menggabungkan masker kain dengan filter PM 2,5 disposable untuk mendapatkan proteksi serupa, dengan kemampuan filtrasi mencapai 95 persen.

“Ada masker kain yang memiliki tempat untuk menyelipkan filter. Apabila beraktivitas, filter ini dapat diganti tiap 12 jam sekali,” katanya.

4. Enhanced Performance Barrier Face Covering (EP-BFC)

Masker EP-BFC sebagai alternatif masker yang dapat digunakan masyarakat.

“Kemampuan filtrasinya mencapai 50-80 persen,” papar Agus.

5. Masker Bedah

Jika tidak memiliki beberapa jenis masker di atas, Agus mengatakan masyarakat masih dapat menggunakan masker bedah.

“Masker bedah masih boleh, karena masih dapat memproteksi 41 sampai 70 persen. Daripada tidak pakai, kan,” katanya.

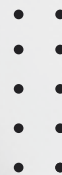
Meskipun demikian, dia tidak merekomendasikan apabila yang digunakan hanya masker kain murni. (bisnis)



Pada prinsipnya, standar masker ini adalah yang mampu memfiltrasi polutan PM 2,5. Itu yang kita rekomendasikan,”

Agus Dwi Susanto

Ketua Komite Penanggulangan Penyakit Respirasi dan Dampak Polusi Udara Kemenkes



KPK Nongol (dari hal 1)

KOMISI Pemberantasan Korupsi atau KPK sedang melakukan pengusutan dugaan korupsi pengadaan sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja. Kasus ini terjadi pada 2012. Saat itu Menteri Tenaga Kerjanya adalah Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Adapun KPK sebelumnya mengatakan akan memanggil Muhaimin untuk diminta keterangan seputar peristiwa rasuah tersebut. Rencana tersebut muncul hampir bersamaan dengan deklarasi Muhaimin sebagai bakal calon presiden untuk Anies Baswedan.

Namun, Juru bicara KPK Ali Fikri buru memastikan bahwa pengusutan kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan pencalonan Cak Imin dalam kontestasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden.

"Kami tegaskan persoalan politik bukan wilayah kerja KPK," kata Ali dikonfirmasi Minggu (3/9/2023).

Ali menegaskan, KPK merupakan penegak hukum yang tegak lurus dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. "Kami penegak hukum dan di bidang penindakan, kacamata kami tegak lurus hanya murni persoalan penegakan hukum tindak pidana korupsi," kata Ali.

Ali pun meminta agar masyarakat tidak menyebarkan isu yang tidak benar terkait pengusutan KPK itu berkaitan dengan strategi politik. "Kami berharap para pihak tersebut tidak lagi menyebar narasi informasi yang tidak utuh," kata Ali.

Dia mengatakan alat bukti dari korupsi sistem proteksi TKI di Kemnaker telah terkumpul sejak Juli 2023. Melalui mekanisme gelar perkara kasus itu lalu dinaikan ke tingkat penyidikan. Surat perintah penyidikan (sprindik) lalu keluar di Agustus 2023.

"Melalui gelar perkara KPK sepakat naik pada proses penyidikan perkara tersebut setelah menemukan kecukupan alat bukti sejak sekitar Juli 2023 dan surat perintah penyidikan terbut setelahnya sudah sejak sekitar Agustus 2023 lalu," kata Ali.

Sebelumnya, Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menjelaskan terkait isu korupsi tersebut.

"Ini terkait dengan di Kemenakertrans (kini Kemenaker), di Kemenakertrans itu tempusnya (waktunya) tahun 2012, perkaranya tersebut," kata dia di kantornya, Jumat (1/9/2023).

Asep mengatakan, sejauh ini salah satu tersangka yang ditetapkan dalam kasus tersebut adalah eks Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kemnaker, Reyna Usman. "Salah satu tersangkanya adalah saudara RU (Reyna Usman). Mengang waktu itu Dirjen di sana, pada saat 2012," kata Asep.

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tiga tersangka itu yakni, Sekretaris Badan Perencanaan dan Pengembangan (Barenbang) Kemenaker I Nyoman Darmanta,

Direktur PT Adi Inti Mandiri Kurnia, dan Reyna Usman.

Nama Cak Imin sempat dikaitkan dengan kasus dugaan korupsi sistem proteksi tenaga kerja Indonesia (TKI) di Kementerian Tenaga Kerja (Kemnaker). Peristiwa korupsi itu terjadi di tahun 2012, kala itu Cak Imin menjabat sebagai Menteri Tenaga Kerja periode 2009-2014.

Selain itu, nama Cak Imin juga sempat terseret karena diduga ikut menikmati dana suap pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah pada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) tahun 2011 silam.

Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program K e m e n a k e r t r a n s D a d o n g Irbarelawan.

Keduanya tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Dharnawati yang memberikan suap senilai Rp 1,5 miliar dalam sebuah kardus durian hingga peristiwa itu disebut kasus kardus durian.

Kardus durian merupakan tempat uang senilai Rp1,5 miliar yang ditemukan petugas Komisi Pemberantasan Korupsi di kantor Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2011. Saat itu atau tepatnya pada 25 Agustus 2011, KPK mencokok Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan anak buahnya, bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan.

Dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tersebut diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari pengusaha yang bernama Dharnawati terkait dengan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Dharnawati yang merupakan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua juga diamankan petugas KPK dalam operasi tangkap tangan itu.

Dadong Irbarelawan membuat pengakuan yang memojokkan keterlibatan Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan komitmen fee dari Dharnawati Rp 1,5 miliar diduga memang akan diberikan kepada Muhaimin.

Adapun Muhaimin hingga kini masih belum berbicara kepada media mengenai perkara ini. Saat wartawan mempertanyakan kasus ini ke Ketua Umum PKB itu pada 22 Oktober 2022 silam, Muhaimin yang baru saja bertemu Presiden Jokowi tak bicara sama sekali.

Partai NasDem pun menilai KPK mengada-ada karena mengusut kembali dugaan korupsi pengadaan software untuk mengawasi kondisi TKI di luar negeri. NasDem mempertanyakan posisi KPK. "KPK ini mengada-ada aja. KPK ini mau jadi penegak hukum atau alat politik," kata

Gus Choi usai deklarasi Anies-Cak Imin di Hotel Majapahit Surabaya.

Gus Choi mengaku heran tiba-tiba kasus tersebut diusut saat Cak Imin mau deklarasi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Dia meminta KPK bisa menjalankan tugasnya dengan benar dan sesuai tupoksi penegakkan hukum. "Kemarin-kemarin ketika Cak Imin belum mau deklarasi cawapres nggak ada isu-isu hukum macem-macam. Kan tenang semua kemarin, sekarang tiba-tiba muncul gitu," jelasnya. "KPK ini alat politik atau penegak hukum? KPK jangan main-mainlah," imbuhnya.

Sementara Anies Baswedan mengaku optimistis semua lancar. "Insyaallah semua lancar," kata Anies di Lapangan Astaka Pancing, Deli Serdang, pada Minggu (3/9/2023).

Gerindra-PDIP 'Buka Pintu' untuk Demokrat

Di sisi lain, Partai Gerindra yang kehilangan satu anggota koalisi yaitu PKB mulai membuka lagi komunikasi dengan Partai Demokrat. Diketahui, Demokrat langsung memutuskan untuk mundur dari KPP dan mencabut dukungan untuk Anies Baswedan.

Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan, dalam beberapa hari ke depan komunikasi dengan Partai Demokrat akan makin intensif. Ini merupakan respons atas dinamika politik saat ini.

"Demokrat komunikasinya akan diintensifkan dalam hari-hari ke depan, hari-hari ini," kata Muzani usai menghadiri konsolidasi zona II pemenangan Pileg dan Pemilihan Calon Presiden Prabowo Subianto di DBL Arena, Surabaya, Minggu (3/9). "Sudah, sudah mulai pembicaraan," tambah dia.

Muzani memastikan, Koalisi Indonesia Maju masih sangat terbuka dengan datangnya kekuatan baru dari partai lainnya. Karena itu juga komunikasi dengan seluruh partai tetap terbuka.

"Mudah-mudahan ada koalisi baru yang akan masuk," ucap dia.

Hal senada diungkapkan Ketua DPP PDIP sekaligus Ketua DPR RI Puan Maharani. Dia mengatakan, keputusan Demokrat ini merupakan sebuah peluang baru untuk mengeratkan kembali komunikasi yang pernah terjalin. Menurutnya, PDIP siap menjajaki kemungkinan kerja sama dengan Demokrat.

"(Komunikasi dengan Demokrat) masih terjalin dan terus terjalin. Tentu saja setelah ini kita akan melakukan silaturahmi untuk menjajaki kemungkinan-kemungkinan yang ada, termasuk ke semua partai," kata Puan dalam keterangannya dikutip Minggu (3/8/2023).

Puan Maharani sudah sempat bertemu dengan Ketua Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono pada 18 Juni 2023. Puan juga datang saat peluncuran buku Tetralogi AHY di Jakarta Theater, 10 Agustus 2023.

Puan meyakini koalisi PDIP dengan PPP juga tetap kuat. Para partai pendukung Ganjar akan terus saling menguatkan. "Kami meyakini PPP masih teguh bisa bersama-sama

dengan PDIP. Kami juga menyadari dinamika politik bisa saja kemudian terjadi suatu dinamika perubahan, namun sampai hari ini kami meyakini PPP akan tetap bersama PDIP," tutur Puan. (wid,rls,kum,tmp,ist/dya)

DUGAAN DANA SUAP 'KARDUS DURIAN'

Lanjutan dari hal 1...

- Kardus durian merupakan tempat uang senilai Rp 1,5 miliar yang ditemukan petugas KPK di kantor Kemenakertrans pada tahun 2011 terkait pengucuran dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah.
- Kasus itu terbongkar setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan (OTT) terhadap dua pejabat Kemenakertrans, yaitu Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (Ditjen P2KT) I Nyoman Suisnaya, serta Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan.
- Keduanya tertangkap bersama seorang pengusaha bernama Dharnawati yang memberikan suap senilai Rp 1,5 miliar dalam sebuah kardus durian hingga peristiwa itu disebut kasus kardus durian.
- Pada 25 Agustus 2011, KPK mencokok Sekretaris Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi I Nyoman Suisnaya dan anak buahnya, bekas Kepala Bagian Perencanaan dan Evaluasi Program Kemenakertrans Dadong Irbarelawan.
- Dua anak buah Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar tersebut diduga menerima suap Rp 1,5 miliar dari pengusaha yang bernama Dharnawati terkait dengan program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT). Dharnawati yang merupakan kuasa direksi PT Alam Jaya Papua juga diamankan petugas KPK dalam operasi tangkap tangan itu.
- Dadong Irbarelawan membuat pengakuan yang memojokkan keterlibatan Muhaimin Iskandar. Dia mengatakan komitmen fee dari Dharnawati Rp 1,5 miliar diduga memang akan diberikan kepada Muhaimin.

TENTANG CAK IMIN

- **Tempat Lahir / Tgl Lahir:**
Jombang / 24 September 1966
- **Riwayat Pendidikan**
- S1 Fisip, UGM Yogyakarta. Tahun: - 1991
- S2 manajemen Komunikasi, Universitas Indonesia. Tahun: - 2001
- **Riwayat Organisasi Politik**
- DPP PKB, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2014 -
- DPP PKB, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 2005 - 2010
- DPP PKB, Sebagai: Sekretaris Jenderal. Tahun: 2004 - 2005
- DPP PKB, Sebagai: Ketua Dewan Tanfidziah. Tahun: 2002 - 2007
- Pengurus Besar PMII, Sebagai: Ketua Umum. Tahun: 1994 - 1997
- DPP PKB, Sebagai: Sekretaris Jenderal. Tahun: 1992 - 2002
- **KEKAYAAN CAK IMIN (MUHAIMIN ISKANDAR) (LHKPN dilaporkan 27 Agustus 2021)**
- **Aset Tanah:** tiga aset tanah dan bangunan di Jakarta Selatan dengan harga yang variatif. Bila ditotal, nilai aset Cak Imin tersebut mencapai sekitar Rp23,697 miliar.
- **Aset Kendaraan:** Satu unit sepeda motor merk Piaggio keluaran 2007 senilai Rp9 juta. Dan satu unit mobil merk Toyota Alphard keluaran 2009 dari warisan senilai Rp250 juta.
- **Harta bergerak lainnya** senilai Rp154 juta
- **Kas dan setara kas** dengan nilai mencapai Rp1.966.033.733.
TOTAL NILAI HARTA KEKAYAAN CAK IMIN :RP26.076.033.733.



Bersama Ribuan Warga Petik Laut di Kraksaan Probolinggo

Gubernur Khofifah: Wujud Pelestarian Budaya untuk Tumbuhkan Kecintaan pada Laut

PROBOLINGGO- Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyatu dengan ribuan masyarakat di acara Petik Laut di Pantai Desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kabupaten Probolinggo, Rabu (2/8/2023).

Secara khusus Gubernur Khofifah menyampaikan apresiasinya terhadap terselenggaranya kegiatan petik laut ini. Menurutnya kegiatan petik laut ini sangat penting dalam pelestarian kearifan lokal sekaligus mempererat kekompakan dan suasana guyub rukun di Desa Kalibuntu.

"Ini adalah bagian dari keguyuban warga desa Kalibuntu kecamatan Kraksaan, semoga semua berseiring dengan ridho Allah," kata Khofifah dalam sambutannya.

Gubernur Khofifah juga mengatakan tradisi petik laut ini tradisi yang sudah ada dari nenek moyang yang berpotensi wisata. Pasalnya di hampir setiap penyelenggaraan petik laut selalu dihadiri ribuan masyarakat.

"Ini akan menjadi potensi wisata yang harus dimanage, saya berdiskusi dengan pak kades memang kita membutuhkan tambahan akses penambatan perahu-perahu," katanya.

Khofifah pun mengaku menikmati petik laut kali ini. Apalagi, banyak anak masih usia balita dan remaja yang sudah dikenalkan dengan laut. Hal itu penting karena akan menumbuhkan rasa cinta kepada laut.

"Kalau cinta laut kita tidak akan merusak habita laut, kita tidak akan buang sampah ke laut, apalagi buang sampah plastik di laut. Kita akan mencintai laut dengan memberikan seluruh habitat yang ada di laut tumbuh dengan baik," tegasnya.

Dalam kesempatan ini, di hadapan masyarakat Desa Kalibuntu, Gubernur Khofifah berkomitmen mencari solusi atas banjir rob yang menjadi permasalahan rutin setiap bulan di desa ini. Apalagi, masalah yang rutin dihadapi ini membutuhkan solusi



yang tepat dan cepat. Sehingga dibutuhkan besaran anggaran yang sesuai untuk bisa menyelesaikan penanganan masalah tersebut.

"Selesai ini saya akan cek, kita berkomitmen untuk memberikan solusi atas banjir rob yang kerap terjadi di desa ini ketika air laut sedang pasang. Kita akan menyiapkan program yang bisa menyelesaikan sebagian dari masalah yang dihadapi masyarakat desa Kalibuntu," jelasnya.

Tak hanya itu, Gubernur Khofifah juga berpesan kepada seluruh masyarakat yang mayoritas nelayan ini untuk dapat menjaga nilai tukar nelayan yang tinggi. Pasalnya nilai tukar nelayan Probolinggo saat ini sudah lebih tinggi dari rata-rata nilai tukar nelayan Provinsi Jawa Timur.

Berdasarkan data dari Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur, nilai tukar nelayan di Kabupaten Probolinggo Maret tahun 2023 mencapai 104,9 sementara rata-rata nilai tukar nelayan provinsi Jawa Timur 101,88. Artinya kesejahteraan nelayan yang diperoleh dari perbandingan besarnya harga yang diterima, dengan harga yang dibayarkan oleh nelayan di Kabupaten Probolinggo ini dapat dikategorikan

relatif tinggi.

Sementara itu, Kepala Desa Kalibuntu Khairul Anam menyampaikan masyarakat kalibuntu sangat antusias, mendukung serta bangga dengan Gubernur Khofifah karena berkenan hadir dan mendukung kegiatan petik laut. Mengingat, kegiatan ini merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dirawat sekaligus menguatkan ketogongroyongan antar masyarakat.

"Kegiatan petik laut menjadi sejarah karena pertama kali dihadiri gubernur mengingat ini merupakan kearifan lokal yang harus dilestarikan dan dijaga dari generasi ke generasi," tandasnya.

Pada kesempatan tersebut, Gubernur Khofifah juga menyerahkan beberapa bantuan kepada masyarakat Probolinggo diantaranya berupa 30.000 ekor benih bandeng, 813 kg pakan ikan, dan 1 unit pompa air senilai Rp. 43.699.000 yang diserahkan untuk Kel. Unggul Sejahtera Kel. pilang Kec. Kademangan Kota Probolinggo.

Selain itu juga diserahkan hibah rumah ikan senilai Rp. 199.245.000 yang diberikan kepada KUB. RANDU TATAH, Desa Randu Tatah, Kecamatan



Paiton, Kabupaten Probolinggo.

Lalu bantuan berupa dokumen perizinan PAS KECIL dan E-BUKU Kapal perikanan kepada 5 orang penerima; hibah Geomembran yang diserahkan kepada Kugar Sidoagung VII Desa Kebonagung, Kec. Kraksaan, Kab. Probolinggo senilai Rp. 150.000.000.

Serta bantuan untuk program kegiatan rehabilitasi terumbu karang buatan - Gili Ketapang, Desa Ketapang, Kec. Sumberasih, Kab. Probolinggo senilai Rp. 191.641.500 juga bantuan berupa alat pasca panen 1 unit mesin Sprayer dan 104 buah keranjang ikan untuk Poklahsar Makmur Jaya Desa Kalibuntu Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo.

Salah satu nelayan Mulyadi (55) mengaku bersyukur atas bantuan 30 ribu ekor benih yang diberikan Khofifah kepada nelayan di desa Kalibuntu.

"Alhamdulillah, terimakasih Bu Khofifah setelah bertahun-tahun kami menunggu akhirnya kali ini dapat bantuan. Bantuan benih ikan sangat penting untuk keberlangsungan hidup nelayan," ungkapny. (ADV)

Varian Pirola Diduga 'Kebal' Vaksin Corona

ATLANTA- Munculnya varian COVID-19 baru yaitu subvarian Omicron BA.2.86 atau lebih dikenal dengan varian Pirola mengejutkan dunia. Pasalnya, varian ini memiliki jumlah mutasi paling banyak dibandingkan varian-varian Corona lainnya, yakni sebanyak 35 mutasi.

Tak hanya itu, diduga varian ini 'kebal' terhadap vaksin yang selama ini sudah diberikan ke masyarakat. Padahal, saat ini Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit AS (CDC) sedang membuat vaksin COVID terbaru yang akan tersedia pada

pertengahan September nanti. Awalnya vaksin COVID terbaru tersebut ditujukan untuk subvarian Omicron XBB.1.5. Namun, kini varian yang bermunculan di tengah masyarakat justru berbeda.

Direktur program magister kesehatan masyarakat Northeastern Neil Maniar dikutip dari Northeastern Global News, Minggu (3/9/2023) mengatakan vaksin yang diperbarui tersebut seharusnya tetap memberikan perlindungan dari Eris. Sebab menurut Maniar, vaksin terbaru tersebut memang diformulasikan

untuk melawan varian Omicron.

Lantas bagaimana dengan varian Pirola? Kemunculan varian Pirola ini mengundang kekhawatiran dari para ilmuwan. "Varian ini sepertinya berbeda. Ada lebih banyak mutasi pada varian ini yang berarti varian ini akan memiliki kemampuan lebih besar untuk menghindari kekebalan yang diberikan oleh vaksin maupun infeksi alami. Kita harus mengawasi varian Pirola ini," ucap Maniar.

Hingga saat ini jumlah kasus akibat varian BA.2.86 masih tergolong rendah. Namun, dengan dengan lebih

dari 30 mutasi protein spike, varian ini diprediksi dapat menimbulkan lonjakan kasus besar. Selain di Denmark, varian ini dikabarkan sudah ditemukan di Israel, Inggris, Amerika Serikat, Kanada, Thailand, Swiss, Norwegia, Swedia, dan Afrika Selatan.

Pirola ditemukan oleh ilmuwan Israel pada Minggu (13/8). Sejak itu, Denmark ikut melaporkan tiga hasil sequencing. Dua sequencing lainnya ditemukan masing-masing di Amerika Serikat dan Inggris. Indonesia sejauh ini belum melaporkan temuan varian ini. (wid,Global News,ist/dya)